

## **PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2010-2012**

### ***THE INFLUENCE OF ECONOMIC GROWTH, REGIONAL REVENUE, GENERAL FUND ALLOCATION, AND SPECIFIC FUND ALLOCATION FOR CAPITAL EXPENDITURE IN THE DISTRICTS OF CENTRAL JAVA PROVINCE IN 2010-2012.***

Oleh : Dian Kuncorowati  
Prodi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta  
diankuncorowati7@gmail.com

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2012. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, regresi linear sederhana, dan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, ditunjukkan dengan nilai signifikansi ( $0,076 > 0,05$ ), nilai koefisien regresi sebesar 0,384; (2) Terdapat pengaruh positif dan signifikan PAD terhadap Belanja Modal yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi ( $0,000 < 0,05$ ), nilai koefisien regresi sebesar 0,640; (3) DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi ( $0,258 > 0,05$ ) dan besarnya nilai koefisien regresi adalah 0,079; (4) Terdapat pengaruh positif dan signifikan DAK terhadap Belanja Modal yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi ( $0,000 < 0,05$ ), besarnya nilai koefisien regresi 0,468; (5) Terdapat pengaruh positif dan signifikan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama terhadap Belanja Modal yang ditunjukkan dengan nilai adjusted  $R^2$  sebesar 0,405 dan  $F sig$  ( $0,000 < 0,05$ ).

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Belanja Modal.

#### **Abstract**

*The purpose of this research is to find out the Influence of Economic Growth, Regional Revenue, General Fund Allocation, and Specific Fund Allocation for Capital Expenditure in the Districts of Central Java Province in 2010-2012. Data analysis techniques applied are classic assumption test, simple linear regression, and multiple linear regression. The results of the research show that: (1) Economic Growth not significant influence on capital expenditures, is shown with level of significant ( $0,076 > 0,05$ ) and regression coefficient 0,384; (2) Regional Revenue has positive and significant influence on capital expenditures is shown with level of significant ( $0,000 < 0,05$ ) and regression coefficient 0,640; (3) General Fund Allocation not significant influence on capital expenditures, is shown with level of significant ( $0,258 > 0,05$ ) and regression coefficient 0,079; (4) Specific Fund Allocation has positive and significant influence on capital expenditures is shown with level of significant ( $0,000 < 0,05$ ) and regression coefficient 0,468; (5) Economic Growth, Regional Revenue, General Fund Allocation, and Specific Fund Allocation has positive and significant impact simultaneously shown by adjusted  $R^2$  0,405 and  $F sig$  ( $0,000 < 0,05$ ).*

*Keywords: Economic Growth, Regional Revenue, General Fund Allocation, Specific Fund Allocation, Capital Expenditure.*

## PENDAHULUAN

Lembaga pemerintahan melakukan berbagai bentuk pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya, hal ini tentunya harus diimbangi dengan melakukan berbagai upaya untuk memperoleh penghasilan guna menutup biaya-biaya tersebut. Oleh karena itu, perlu disusun anggaran pemerintah terkait dengan penentuan jumlah alokasi dana untuk setiap kegiatan atau aktivitas yang akan dilakukan.

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang luas dalam menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja modal. Pemerintah daerah menggunakan alokasi belanja modal dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, seperti untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah sebaiknya mengubah komposisi belanjanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik (Darwanto, 2007). Pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan (Saragih, 2003). Namun, peningkatan belanja daerah lebih banyak digunakan untuk membiayai

belanja rutin yang relatif kurang produktif.

Menurut Boediono (1985), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang. Kenaikan *output* bisa diukur dengan pertambahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan penjumlahan nilai *output* bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupaten/kota) dan dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender). Pertumbuhan ekonomi yang positif memberikan keuntungan bagi perkembangan atau kemajuan di segala bidang kegiatan ekonomi, terutama pembangunan. Namun, kenyataan yang terjadi pada pemerintah daerah saat ini adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan peningkatan belanja modal.

PAD merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom (Riduansyah, 2003). Peningkatan PAD diharapkan bisa meningkatkan investasi belanja modal sehingga dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik. Namun, pemerintah daerah masih menghadapi banyak masalah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah,

misalnya keterbatasan sarana dan prasarana yang tidak mendukung investasi menimbulkan pertanyaan tentang pengaruh PAD terhadap belanja modal, yaitu mengenai PAD yang rendah atau alokasi yang kurang tepat (Mardiasmo, 2002).

Di samping Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah juga mempunyai dana perimbangan yang salah satunya memberikan masukan terbesar, yaitu Dana Alokasi Umum (Harianto dan Adi, 2007). Dana Alokasi Umum suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Alokasi Dana Umum bagi daerah dengan potensi fiskal yang besar tetapi kebutuhan fiskal yang kecil akan memperoleh Dana Alokasi Umum relatif kecil. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan fiskal dan besarnya kebutuhan pendanaan daerah sehingga dalam beberapa tahun berjalan proporsi untuk Dana Alokasi Umum masih besar.

Dana Alokasi Khusus berperan mengurangi biaya kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat

yang belum mencapai standar atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Selain pertumbuhan ekonomi, PAD, dan DAU, DAK juga memiliki pengaruh terhadap anggaran belanja modal karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik (Situngkir, 2009).

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) selama periode 2005-2009 terjadi peningkatan jumlah belanja daerah di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Namun pada kenyataannya sebagian besar peningkatan belanja daerah lebih banyak dialokasikan untuk membiayai hal yang relatif kurang produktif, misalnya belanja rutin.

Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus merupakan empat variabel yang berhubungan dengan belanja modal suatu daerah. Berikut adalah data keempat unsur tersebut di Provinsi Jawa Tengah:

1. Menurut data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada tahun 2006-2008 peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan peningkatan belanja modal. Hal

ini dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja modal dibandingkan dengan jumlah belanja pegawai yang terdapat dalam struktur APBD di Jawa Tengah pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Belanja Modal dan Belanja Pegawai Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006-2008 (Dalam Rp Juta)

Tahun	Belanja Modal	Belanja Pegawai	% Belanja Modal	% Belanja Pegawai
2006	2.976.591,97	10.538.212,76	16,27%	56,75%
2007	4.617.336	12.779.752	20,09%	55,60%
2008	4.980.625	15.932.038	18,10%	67,91%

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (diolah)

2. Data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menunjukkan pada tahun 2004-2006 proporsi PAD pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah rata-rata hanya mampu membiayai belanja modal sebesar 11,37%.

3. Data dari Direktorat Jenderal Keuangan tahun 2004-2006 menunjukkan jumlah Dana Alokasi Umum pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah memberikan kontribusi yang besar pada belanja modal yaitu sebesar 79,93%.

4. Data dari Direktorat Jenderal Keuangan tahun 2004-2006 menunjukkan jumlah Dana Alokasi

Khusus pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah memberikan kontribusi pada belanja modal sebesar 2,93%.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah tidak diikuti dengan kenaikan belanja modal dilihat dari prosentase rata-rata belanja modal sebesar 18,15% lebih kecil dari belanja pegawai yang lebih besar yaitu 60,08% pada tabel 1, begitu pula dengan proporsi PAD pada tahun 2004-2006 yang belum bisa dimanfaatkan secara maksimal, sehingga terjadi transfer yang cukup meningkat dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah berupa DAU dan DAK. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana ini untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang kurang penting (Darwanto, 2007).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2012”.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kausal komparatif karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat yang berdasar pada pengamatan terhadap akibat yang ada dan mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu.

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Ruang lingkup penelitian ini memusatkan pada pembahasan mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Tengah. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret-Juni 2014.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi yang digunakan seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2012. Sampel dalam penelitian ini adalah jumlah keseluruhan populasi yang ada yaitu seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Teknik pengambilan sampel adalah sensus.

### **Definisi Operasional Variabel Penelitian**

#### **Variabel Dependen (Y)**

Variabel dependen pada penelitian ini adalah belanja modal. Menurut Nurlan Darise (2008) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap ber-wujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

#### **Variabel Independen (X)**

##### 1) Pertumbuhan Ekonomi ( $X_1$ )

Menurut Boediono (1985), pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang. Kenaikan output disini bisa diukur dengan pertambahan PDRB. PDRB merupakan penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh ke-giatan ekonomi di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupaten/kota), dan dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kelender).

##### 2) Pendapatan Asli Daerah ( $X_2$ )

Menurut UU. No. 32 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah PAD yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

3) Dana Alokasi Umum ( $X_3$ )

DAU merupakan dana yang ber-sumber dari APBN yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan ke-uangan antar daerah guna membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

4) Dana Alokasi Khusus ( $X_4$ )

DAK merupakan dana yang digunakan khusus untuk membiayai investasi pengadaan dan atau perbaikan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang.

### Teknik Pengumpulan Data

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Data diperoleh dari sumber data sekunder. Sumber data dokumen diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui website [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id), untuk tahun 2010-2012. Data yang diperoleh berupa data mengenai jumlah realisasi belanja modal, PAD, DAU, dan DAK. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

### Teknik Analisis Data

#### Uji Asumsi Klasik

1) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan korelasi/hubungan yang terjadi di antara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu (seperti pada data runtun waktu atau *time series data*) atau yang tersusun dalam rangkaian ruang (seperti pada data silang waktu atau *cross-sectional data*). Persamaan data yang baik adalah persamaan yang tidak memiliki autokorelasi sehingga layak dipakai untuk prediksi. Salah satu ukuran menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin Watson (DW) dengan ketentuan:

- a) Terjadi autokorelasi positif, jika nilai DW di bawah -2 ( $DW < -2$ ).
- b) Tidak terjadi autokorelasi, jika nilai DW berada di antara -2 dan +2 atau  $-2 \leq DW \leq +2$ .
- c) Terjadi autokorelasi negatif jika nilai DW di atas +2 atau  $DW > +2$ .

2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan linear di antara variabel-variabel bebas dalam model regresi. Persamaan regresi yang baik tidak memuat lebih dari satu adanya hubungan linear yang nyata diantara variabel- variabel penjelasnya.

3) Uji Heteroskedastisitas

Dalam persamaan regresi berganda perlu adanya pengujian mengenai sama atau tidaknya varians dari residual observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varians yang sama disebut homoskedastisitas dan jika variansnya tidak sama maka disebut terjadi heteroskedastisitas (Sunyoto, 2007).

**Uji Hipotesis**

**Regresi Linear Sederhana**

Analisis data ini digunakan untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap realisasi Belanja Modal, pengaruh PAD terhadap realisasi Belanja Modal, pengaruh DAU terhadap realisasi Belanja Modal, dan pengaruh DAK terhadap realisasi Belanja Modal. Model persamaan yang di-gunakan dalam analisis regresi linier sederhana sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y : Variabel dependen (realisasi Belanja Modal)

X : Variabel independen (Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, dan DAK)

a : Konstanta, nilai Y jika X = 0

b : Koefisien regresi linear sederhana (Sugiyono, 2012: 261)

a) Koefisien determinasi ( $r^2$ )

Mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. (Arfan, 2008: 249).

b) Menguji signifikansi koefisien korelasi dengan uji t

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t : Nilai t hitung

r : Koefisien korelasi sederhana

n : Jumlah sampel

(Sugiyono, 2010: 230)

Kriteria pengambilan kesimpulan sebagai berikut :

(1) Jika nilai t hitung > t tabel, hipotesis alternatif ( $H_a$ ) diterima yaitu Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap realisasi Belanja Modal, PAD berpengaruh positif terhadap realisasi Belanja Modal, DAU berpengaruh positif terhadap realisasi Belanja Modal, dan DAK berpengaruh positif terhadap realisasi Belanja Modal.

(2) Jika nilai t hitung < t tabel, hipotesis alternatif ( $H_a$ ) ditolak.

**Regresi Linear Berganda**

Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda bertujuan untuk memprediksi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Sekaran, 1992). Hubungan antar variabel

dapat dihubungkan dengan persamaan berikut ini :

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{Pertumbuhan Ekonomi} + \beta_2 \text{PAD} + \beta_3 \text{DAU} + \beta_4 \text{DAK} + e$$

Keterangan :

Y = Belanja Modal

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Slope atau koefisien regresi

PE = Diukur dengan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

E = Error

a) Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

b) Uji Statistik F

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara semua variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai F dihitung dalam bentuk koefisien determinasi sebagai berikut :

$$F \text{ hitung} = \frac{ESS/(k-1)}{RSS/(n-1)}$$

Keterangan :

ESS = *Explained Sum Square*

RSS = *Residual Sum Square*

N = Jumlah sampel yang diambil

K = Jumlah variabel yang diambil

Hipotesis :

H0 : semua variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

H1 : semua variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

c) Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh tiap-tiap variabel independen terhadap variabel dependennya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Data Umum

Objek pada penelitian ini adalah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah, berjumlah 35 kabupaten dan kota. Setelah dilakukan pengumpulan data maka diketahui tidak adanya data realisasi APBD Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo untuk tahun 2010 dan tidak terdapat rincian mengenai DAK Kabupaten Jepara untuk tahun 2012, sehingga agar tidak mengganggu pengujian dalam penelitian maka data APBD Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Jepara dikeluarkan dari objek penelitian.

Data penelitian terkait PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal berasal dari laporan realisasi APBD kabupaten dan kota di Jawa Tengah tahun 2010-2012 yang didapat dari situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan N



berjumlah 96. Data Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah.

### **Data Khusus**

Terdapat lima jenis variabel pada penelitian ini yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal. Untuk mendeskripsikan dan menguji pengaruh antara variabel bebas dan terikat, maka pada bagian ini akan disajikan deskripsi data yang telah diperoleh. Deskripsi data yang disajikan meliputi nilai minimal, maksimal, mean, dan standar deviasi.

#### **a. Belanja Modal**

Data sekunder yang dipakai merupakan data yang mengalami proses transformasi dengan menggunakan salah satu persamaan regresi yaitu Ln (Logaritma Natural). Variabel Belanja Modal (BM) mempunyai nilai minimum 10,15 atau sama dengan Rp25.479.000.000,00 yang diperoleh dari Kabupaten Batang pada tahun 2010 dan nilai maksimum sebesar 12,77 atau sama dengan Rp351.854.000.000,00 yang diperoleh dari Kota Semarang pada tahun 2012. Nilai mean 11,7050, dan nilai standar deviasi 0,51971.

#### **b. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan Ekonomi (PE) mempunyai nilai minimum -3,91 yang diperoleh dari Kabupaten Grobogan pada tahun 2010 serta Kabupaten Klaten tahun 2010 dan 2011. Nilai maksimum untuk variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) yaitu -2,66 yang diperoleh dari Kabupaten Sragen pada tahun 2011 dan 2012, Kota Magelang tahun 2012 serta Kota Semarang pada tahun 2012. Nilai mean -3,0028 dan nilai standar deviasi 0,24634.

#### **c. Pendapatan Asli Daerah**

Variabel PAD mempunyai nilai minimum sebesar 10,72 atau sama dengan Rp45.422.000.000,00 diperoleh dari Kabupaten Batang pada tahun 2010 dan nilai maksimum sebesar 13,57 atau sama dengan Rp779.617.000.000,00 diperoleh dari Kota Semarang pada tahun 2012. Nilai mean 11,4658 dan nilai standar deviasi 0,46879.

#### **d. Dana Alokasi Umum**

Variabel DAU mempunyai nilai minimum 6,54 atau sama dengan Rp691.000.000,00 yang diperoleh dari Kabupaten Semarang pada tahun 2012 dan nilai maksimum sebesar 13,87 atau sama dengan Rp1.057.810.000.000,00 yang diperoleh dari Kabupaten Cilacap pada tahun 2012. Nilai mean 13,1886 dan nilai standar deviasi 0,76489.

## e. Dana Alokasi Khusus

Variabel Dana Alokasi Khusus mempunyai nilai maksimum 11,69 atau sama dengan Rp118.902.000.000,00 yang diperoleh dari Kabupaten Banyumas pada tahun 2012 dan nilai minimum sebesar 9,62 atau sama dengan Rp15.047.000.000,00 yang diperoleh dari Kota Magelang pada tahun 2010. Nilai mean 10,9561 dan nilai standar deviasi 0,43659.

**Analisis Data**

## a. Uji Asumsi Klasik

## 1) Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Durbin-Watson (DW)	1,638
Batas Atas (dU)	1,755
Batas Bawah (dL)	1,579

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2014

Berdasarkan hasil uji Durbin-Watson pada tabel 5. diperoleh nilai DW sebesar 1,638. Dari tabel Durbin-Watson dengan  $k=4$  (jumlah variabel independen) dan  $n=96$  (jumlah sampel), diperoleh batas atas (dU) sebesar 1,755 dan batas bawah (dL) sebesar 1,579. Nilai DW berada diantara nilai dU dan dL, sehingga tidak dapat disimpulkan. Oleh karena itu dilakukan uji lanjutan yaitu uji Runs Test.

Tabel 6. Hasil Uji Runs Test

<i>Test Value</i> <sup>a</sup>	.24
<i>Cases &lt; Test Value</i>	48
<i>Cases ≥ Test Value</i>	48
<i>Total Cases</i>	96
<i>Number of Runs</i>	45
<i>Z</i>	-.821
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	.412

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2014.

Tabel 6. menunjukkan nilai *asymp.sig* lebih besar dari 0,05 ( $0,412 > 0,05$ ) dan menunjukkan data bebas dari masalah autokorelasi.

## 2) Uji Multikolinearitas

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas

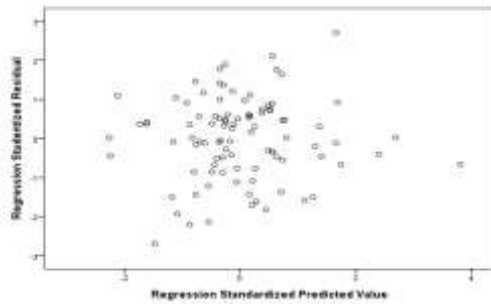
Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF
PE	0,820	1,220
PAD	0,812	1,231
DAU	0,880	1,136
DAK	0,843	1,186

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2014

Tabel 7. menunjukkan bahwa nilai toleransi masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF di bawah 10. Hal ini menunjukkan bahwa pada model regresi tidak terdapat masalah multikolinearitas.

## 3) Uji Heterokedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini didasarkan pada *Scatterplots*.



Gambar 2. Diagram heteroskedastisitas  
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2014.

Dari gambar 2. di atas terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah sumbu Y, tidak ada pola tertentu yang teratur. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.

b. Pengujian Hipotesis

Tabel 8. Rangkuman Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana H<sub>1</sub>

Perhitungan		Sig	α	Koef.
r <sub>(x1y)</sub>	r <sup>2</sup> <sub>(x1y)</sub>			
0,182	0,033	0,076	12,858	0,384

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2014

Berdasarkan tabel 8 di atas diperoleh nilai signifikansi lebih besar dari *level of significant* (0,076>0,05). Nilai koefisien regresi sebesar 0,384 sehingga dapat diartikan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap realisasi Belanja Modal.

Tabel 9. Rangkuman Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana H<sub>2</sub>

Perhitungan		Sig	α	Koef.
r <sub>(x1y)</sub>	r <sup>2</sup> <sub>(x1y)</sub>			
0,578	0,334	0,000	4,362	0,640

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2014.

Berdasarkan tabel 9 di atas diperoleh nilai signifikansi lebih kecil dari *level of significant* (0,000 < 0,05) yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan PAD terhadap Belanja Modal. Nilai koefisien korelasi r<sub>(x1y)</sub> sebesar 0,578 dan nilai koefisien determinasi r<sup>2</sup><sub>(x1y)</sub> sebesar 0,334, dapat diartikan besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap realisasi Belanja Modal yaitu 33,4%.

Besarnya nilai koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah 0,640 dan bilangan konstantanya 4,362. Berdasarkan angka tersebut dapat disusun persamaan garis regresi satu prediktor sebagai berikut:

$$Y = 4,362 + 0,640X_2$$

Dari bentuk persamaan regresi di atas menunjukkan bahwa jika nilai X<sub>2</sub> dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan maka realisasi Belanja Modal akan tetap sebesar 4,362. Jika nilai Pendapatan Asli Daerah (X<sub>2</sub>) naik satu satuan maka nilai Y naik sebesar 0,640 satuan. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Pendapatan Asli Daerah terhadap realisasi Belanja Modal. Artinya semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah suatu Kabupaten dan Kota maka realisasi Belanja Modal semakin tinggi.

Tabel 10. Rangkuman Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana H<sub>3</sub>

Perhitungan		Sig	$\alpha$	Koef.
$r_{(x1y)}$	$r^2_{(x1y)}$			
0,117	0,014	0,258	10,660	0,079

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2014

Berdasarkan tabel 10 di atas diperoleh nilai signifikansi lebih besar dari *level of significant* ( $0,258 > 0,05$ ) dan besarnya nilai koefisien regresi adalah 0,079, dapat diartikan bahwa pengaruh positif DAU terhadap Belanja Modal tidak signifikan.

Tabel 11. Rangkuman Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana H<sub>4</sub>

Perhitungan		Sig	$\alpha$	Koef.
$r_{(x1y)}$	$r^2_{(x1y)}$			
0,393	0,154	0,000	6,579	0,468

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2014.

Berdasarkan tabel 11 di atas diperoleh nilai signifikansi lebih kecil dari *level of significant* ( $0,000 < 0,05$ ). Nilai koefisien korelasi  $r_{(x1y)}$  sebesar 0,393 dan nilai koefisien determinasi  $r^2_{(x1y)}$  sebesar 0,154, dapat diartikan besarnya pengaruh DAK terhadap realisasi Belanja Modal yaitu 15,4%.

Besarnya nilai koefisien regresi DAK 0,468 dan bilangan konstantanya 6,579. Berdasarkan angka tersebut dapat disusun persamaan garis regresi satu prediktor sebagai berikut :

$$Y = 6,579 + 0,468X_4$$

Dari bentuk persamaan regresi ini menunjukkan bahwa jika nilai  $X_4$

dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan maka realisasi Belanja Modal akan tetap sebesar 6,579. Jika nilai Dana Alokasi Khusus ( $X_4$ ) naik satu satuan maka nilai Y naik sebesar 0,468 satuan. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan Dana Alokasi Khusus terhadap realisasi Belanja Modal. Artinya semakin tinggi Dana Alokasi Khusus suatu Kabupaten dan Kota maka realisasi Belanja Modal semakin tinggi.

Tabel 12. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda H<sub>5</sub>

Variabel	Koef.	t hitung	Sig.	Standardized Coefficients
PE ( $X_1$ )	0,054	0,291	0,772	0,025
PAD ( $X_2$ )	0,578	5,936	0,000	0,521
DAU ( $X_3$ )	-0,031	-0,537	0,593	-0,045
DAK ( $X_4$ )	0,393	3,835	0,000	0,330
Constant				1,338
Adj. R <sup>2</sup>				0,405
F hitung				17,181
F sig.				0,000
$R_{y(x1x2x3x4)}$				0,656
$R^2_{y(x1x2x3x4)}$				0,430

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2014.

Dari hasil perhitungan regresi linear berganda pada tabel 12 di atas, dapat diketahui hubungan antar variabel independen dan variabel dependen yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Belanja Modal} \\ = & 1,338 + 0,054PE + 0,578PAD - \\ & 0,031DAU + 0,393DAK \end{aligned}$$

Persamaan tersebut dapat diartikan :

- a) Konstanta sebesar 1,338 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel independen dianggap konstan ( $X_1=0$ ,  $X_2=0$ ,  $X_3=0$ , dan  $X_4=0$ ), maka Belanja Modal tiap daerah sebesar 1,338.
- b) Pertumbuhan Ekonomi tidak signifikan.
- c) Koefisien Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertambah sebesar 0,578, artinya apabila terjadi perubahan PAD sebesar 1% akan menaikkan Belanja Modal sebesar 0,578 atau 57,8%.
- d) Dana Alokasi Umum tidak signifikan.
- e) Koefisien Dana Alokasi Khusus (DAK) bertambah sebesar 0,393, artinya apabila terjadi perubahan DAK sebesar 1% akan menambah Belanja Modal sebesar 0,393 atau 39,3%.

Koefisien determinasi yang digunakan dalam model analisis regresi berganda adalah adjusted  $R^2$ . Dari hasil regresi diperoleh nilai adjusted  $R^2$  sebesar 0,405. Hal ini menunjukkan bahwa 40,5% variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dan sisanya sebesar 59,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

Pada penelitian ini diperoleh nilai F signifikan yang lebih kecil dari tingkat

kesalahan ( $0,000 < 0,05$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya dilakukan uji t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Tabel 12 menunjukkan variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen pada tingkat kepercayaan 95% adalah variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus, sedangkan variabel independen Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Pada kolom *standardized coefficient* di tabel 12 diperoleh kesimpulan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah dan DAK dengan nilai koefisien 0,521 dan 0,330 mempunyai pengaruh besar terhadap Belanja Modal.

### **Pembahasan Hasil Penelitian Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal**

Hasil pengujian statistik menunjukkan Pertumbuhan Ekonomi ( $X_1$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal ( $\text{sig} > 0,05$ ). Hasil ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan

Ekonomi tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap Belanja Modal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Darwanto (2007) yang menyebutkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) memiliki korelasi positif namun tidak signifikan terhadap variabel Belanja Modal. Hasil dari penelitian Darwanto (2007) menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh yang nyata terhadap Belanja Modal.

Hasil dari hipotesis pertama ditolak dimungkinkan karena Pertumbuhan Ekonomi tidak dipertimbangkan sebagai acuan utama dalam penyusunan Belanja Modal. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana sehingga perbedaan kemampuan setiap daerah dalam mengelola dan mengembangkan potensi yang dimiliki menyebabkan belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal.

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal**

PAD mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Hasil ini membuktikan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka belanja modal akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya jika semakin rendah Pendapatan Asli Daerah maka Belanja Modal akan semakin rendah.

Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Darwanto (2007) yaitu variabel PAD memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap belanja modal. Artinya PAD memiliki pengaruh yang nyata terhadap belanja modal dan hubungannya positif.

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Nilai koefisiensi regresi yang diperoleh bernilai negatif yaitu sebesar  $-0,031$ , dengan tingkat signifikansi sebesar  $0,593$ .

Hasil ini mendukung beberapa penelitian yang juga menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, antara lain penelitian Rumahorbo (2012) dan Supatman (2011) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Modal (BM). Penelitian Lismawati (2013) memberikan bukti empiris bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal. Kusnandar

(2012) menemukan bahwa secara parsial DAU tidak berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal.

Namun, penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda dengan penelitian Darwanto (2007) yang menyatakan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Begitu pula dengan hasil yang didapat dari penelitian yang dilakukan oleh Harianto dan Adi (2007) yang menyimpulkan adanya indikasi bahwa belanja modal sangat ditentukan oleh faktor DAU.

Hasil hipotesis ketiga ditolak dimungkinkan karena adanya perbedaan tujuan pemanfaatan DAU antara pemerintah pusat dan daerah. DAU bersifat "*Block Grant*", memungkinkan daerah menggunakan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa DAU yang dalam proporsi penerimaan daerah merupakan sumber pendapatan paling besar hanya digunakan untuk pengeluaran rutin, seperti untuk belanja pegawai. Hal ini menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum yang selama ini diterima daerah tidak banyak digunakan untuk pembangunan daerah melalui alokasi Belanja Modal.

### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, hipotesis keempat yang menyatakan "Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap realisasi Belanja Modal" terbukti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi Belanja Modal. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi DAK maka Belanja Modal akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya semakin rendah DAK maka Belanja Modal akan semakin rendah.

Dana perimbangan merupakan perwujudan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Salah satu dana perimbangan adalah Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus berperan mengurangi biaya kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus ditujukan khusus untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus (Kuncoro, 2004). Hal ini dikarenakan DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik (Situngkir, 2009).

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Situngkir (2009) yang menyatakan bahwa

Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap anggaran belanja modal hal ini disebabkan DAK hanya digunakan untuk kepentingan khusus saja. Hal ini sesuai dengan data bahwa DAK hanya dialokasikan untuk Dana Reboisasi (DR) ([www.depkeu.djpk.go.id](http://www.depkeu.djpk.go.id)), yang merupakan bagian 40% dari total penerimaan DR. Sejalan dengan UU Nomor 33 Tahun 2004, sejak tahun 2006 DAK DR yang sebelumnya merupakan bagian dari DAK dikelompokkan ke dalam Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan.

Pada tahun 2004, DAK Non-DR dialokasikan untuk infrastruktur air bersih serta bidang kelautan dan perikanan, dan pada tahun 2005 terdapat penambahan bidang, yaitu pertanian. Selanjutnya, pada tahun 2006 bidang yang didanai melalui DAK ditambah bidang lingkungan hidup. Bahkan pada tahun 2008 bertambah dua bidang, yaitu bidang keluarga berencana (KB) dan bidang kehutanan. Untuk menunjukkan komitmen daerah dalam pelaksanaan DAK, daerah diwajibkan menganggarkan dana pendamping dalam APBD, sekurang-kurangnya 10% dari besaran alokasi DAK yang diterima.

### **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Secara Bersama-sama terhadap Belanja Modal**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap realisasi Belanja Modal. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai F signifikan sebesar 0,000 lebih kecil daripada nilai probabilitas yang telah ditentukan 0,05 atau  $0,000 < 0,05$  sehingga hipotesis kelima diterima.

Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu ciri pokok dalam proses pembangunan. Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan pertambahan penduduk. Bertambahnya infrastruktur dan perbaikan oleh pemerintah diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah, biasanya jika Pertumbuhan Ekonomi suatu daerah baik maka pemerintah daerah akan meningkatkan belanja modalnya dari tahun ke tahun guna melengkapi sarana prasarana dan infrastruktur, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada tahun anggaran.

Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana akan berpengaruh



terhadap tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk menanam modalnya pada daerah tersebut dan pada akhirnya akan meningkatkan PAD. Peningkatan PAD diharapkan akan mampu memberi efek yang signifikan terhadap Belanja Modal oleh pemerintah begitu pula dengan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang pemerintah pusat berikan kepada daerah. Seperti halnya PAD, Dana Alokasi Umum merupakan salah satu pembiayaan untuk Belanja Modal guna pengadaan sarana dan prasarana dalam rangka pemberian pelayanan publik yang baik dari pemerintah daerah kepada masyarakat.

Fungsi Dana Alokasi Umum adalah sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal. Dana Alokasi Umum suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Alokasi Dana Umum bagi daerah dengan potensi fiskal yang besar tetapi kebutuhan fiskal yang kecil akan memperoleh Dana Alokasi Umum relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang memiliki potensi fiskal kecil tetapi kebutuhan fiskal besar akan memperoleh Dana Alokasi Umum relatif besar (Darise, 2008). Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan fiskal dan besarnya kebutuhan pendanaan

daerah sehingga dalam beberapa tahun berjalan proporsi untuk DAU masih besar.

DAK berperan mengurangi biaya kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Kegiatan khusus adalah kegiatan yang sulit dirumuskan dengan rumus alokasi umum karena kebutuhan setiap daerah berbeda.

Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus yang meningkat diharapkan memberikan peningkatan terhadap anggaran Belanja Modal sehingga pembangunan untuk sektor publik bisa lebih ditingkatkan lagi.

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa:

- a. Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,054 dan nilai signifikansi sebesar 0,772.
- b. Pendapatan Asli Daerah ber-pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini ditunjukkan

dengan angka koefisien regresi sebesar 0,578 dan nilai signifikansi sebesar 0,000.

- c. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini ditunjukkan dengan angka koefisien regresi -0,031 dan *sig* sebesar 0,593.
- d. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini ditunjukkan dengan angka koefisien regresi sebesar 0,393 dan *sig* 0,000.
- e. Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *F* lebih kecil dari tingkat kesalahan ( $0,000 < 0,05$ ).

### **Saran**

Berdasar hasil pembahasan dan kesimpulan serta keterbatasan penelitian di atas maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut:

#### a. Bagi Pemerintah Daerah

- 1) Untuk meningkatkan Belanja Modal maka pemerintah daerah diharapkan bisa terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah.

- 2) Supaya memprioritaskan alokasi DAK dan belanja modal pada bidang-bidang yang langsung bersentuhan dengan kepentingan publik, seperti infrastruktur atau fasilitas-fasilitas yang dapat menambah pengalokasian belanja modal.

#### b. Bagi Penelitian Selanjutnya

- 1) Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan ruang lingkup yang lebih luas contohnya seluruh Indonesia agar menunjukkan hasil yang lebih representatif.
- 2) Variabel yang digunakan dalam penelitian akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi dengan menambah variabel independen lain, contohnya jenis penerimaan pemerintah lainnya maupun variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makro ekonomi.
- 3) Bagi peneliti berikutnya, data yang digunakan tidak terbatas pada nilai yang tercantum dalam realisasi APBD, sebaiknya menggunakan rasio yaitu perbandingan realisasi laporan anggaran dengan alokasi belanja tidak langsung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2011). Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran. Diambil dari: <http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2011/101~PMK.02~2011PerLamp%20III.htm>, pada tanggal 16 November 2013.
- Badan Pusat Statistik. Diambil dari : [jateng.bps.go.id](http://jateng.bps.go.id), pada tanggal 17 Desember 2013.
- Basri, Faisal. (2002). *Perekonomian Indonesia (Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Indonesia)*. Erlangga, Jakarta.
- Basuki. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Boediono. (1985). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Darise, Nurlan. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. PT. Indeks, Jakarta.
- Darwanto & Yustikasari. (2007). "Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal". Simposium Nasional Akuntansi X.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Diambil dari : <http://www.djpk.depkeu.go.id/produk-hukum/undang-undang>, pada tanggal 23 Mei 2013.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gujarati, Damodar, N. (2006). *Dasar-dasar Ekonometrika Jilid I*. Alih Bahasa oleh Julius A. Mulyadi. Erlangga, Jakarta.
- Halim, Abdul & Syukriy Abdullah. (2004). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemda: Studi Kasus Kabupaten dan Kota di Jawa dan Bali. *Jurnal Ekonomi STEI* No.2/Tahun XIII/25.
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah : Edisi Ketiga*. Salemba Empat, Jakarta.
- Harianto, David dan Priyo Hari Adi. (26-28 Juli 2007). "Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Perkapita. Simposium Nasional Akuntansi X, Unhas Makassar.
- Ikhsan, Arfan. (2008). *Metodologi Penelitian Akuntansi Keperilakuan*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. (2004). *Otonomi & Pembangunan Daerah (Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang)*. Erlangga, Jakarta.
- Kusnandar, Dodik Siswanto. (2012). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal. Vol.15, Jurnal dan Prosiding SNA-Simposium Nasional Akuntansi. Universitas Indonesia. Diambil dari : <http://repository.unib.ac.id/750/>, pada tanggal 29 April 2014.
- Lismawati. (2013). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), luas wilayah, serta Belanja Barang dan

- Jasa (BBJ) terhadap belanja modal. Thesis (Undergraduated). UNIB. Diambil dari: <http://repository.unib.ac.id/750/>, pada tanggal 29 April 2014.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nawari. (2010). *Analisis Regresi dengan MS Excel 2007 dan SPSS 17*. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Oates, Wallace E. (1995). *Comment on "Conflict and Dilemmas of decentralization" by Rudolf Holmes*. The World Bank Research Observer. Hal : 351 – 353.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 tentang pedoman penggunaan AKUN pendapatan, belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Diambil dari : <http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp?ContentId=479>, pada tanggal 18 Januari 2014.
- PMK Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS). Diambil dari: <http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-content-list.asp?ContentId=479>, pada tanggal 18 Januari 2014.
- Prakosa, Kesit Bambang. (2004). "Analisa Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Propinsi Jawa Tengah dan DIY)". *JAAI*. Vol. 8. No. 2. 101-118.
- Putro, Nugroho Suratno. (2010). "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah)". Skripsi Dipublikasikan, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Sekretariat Negara. Salemba Empat, Jakarta.
- Riduansyah, Mohammad. (2003). *Kontribusi Pajak Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)*. [Internet, Desember, 7(2), pp.49-57. Diambil dari: <http://journal.ui.ac.id/humanities/article/view/51>, pada tanggal 30 September 2013.
- Rumahorbo, Rudolf Herianto.(2012). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Tengah. *Tesis*. Universitas Gadjah Mada. Diambil dari:<http://etd.ugm.ac.id/index.php?m>

- od=penelitian\_detail&sub=Penelitian Detail&act=view&typ=html&buku\_id=55122&obyek\_id=4, pada tanggal 29 April 2014.
- Santoso, Singgih. (1999). *Mengolah Data Statistik Secara Profesional*. PT. Elex Komputindo, Jakarta.
- Saragih, Juli Panglima. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sekaran, Uma. (1992). *Research Methods for Business (A Skill Building Approach)*. Second Edition. John Wiley & Sons. New York.
- Sidik, Machfud. (2002). "Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia)". *Seminar Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta, 13 Maret 2002.
- Situngkir, Anggiat. (2009). *Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, dan DAK terhadap alokasi anggaran Belanja Modal*. Tesis Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi. Universitas Sumatera Utara.
- Soekarwo. (2003). *Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : CV Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2012). *Statistik untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. (2012). *Makro Ekonomi (Teori Pengantar)* : Edisi Ketiga. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sularso, Fitria Megawati. (2013). "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat". Skripsi Dipublikasikan, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Widyatama, Bandung.
- Sumodiningrat, Gunawan. (1994). *Ekonometrika Pengantar*. BPFE, Yogyakarta.
- Sunyoto, Danang. (2007). *Analisis Regresi dan Korelasi Bivariat*. Amara Books, Yogyakarta.
- Suparmoko. (2002). *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah : Edisi Pertama*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Supatman. (2011). *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening*. Tesis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Diambil dari: [http://pustaka.fe.unpad.ac.id/index.php/tesis/detail/68/pengaruh\\_dana\\_alokasi\\_umum-dau-dana-alokasi-khusus-dak-dan-pendapatan-asli-daerah-pad-terhadap\\_pertumbuhan-ekonomi-dengan-belanja-modal\\_sebagai-variabel-intervening-](http://pustaka.fe.unpad.ac.id/index.php/tesis/detail/68/pengaruh_dana_alokasi_umum-dau-dana-alokasi-khusus-dak-dan-pendapatan-asli-daerah-pad-terhadap_pertumbuhan-ekonomi-dengan-belanja-modal_sebagai-variabel-intervening-), pada tanggal 29 April 2014.
- Syukriy Abdullah dan Abdul Halim. (2004). "Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah". Simposium Nasional Akuntansi VI. Hal. 1140-1159.

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

UU Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan.

UU Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan Daerah.

UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan Daerah.

Yovita, Farah Marta. (2011). "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se Indonesia Periode 2008-2010)". Jurnal Dipublikasikan. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro, Semarang.